

BAB V

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

Bagian ini berisi tentang temuan penelitian yang menjawab seluruh rumusan masalah. Temuan dirumuskan setelah dilaksanakan analisis yang mendalam atas persoalan yang diteliti dengan menampilkan data-data penelitian yang telah lewat proses metodologi ilmiah. Di bagian ini juga ditampilkan intepretasi terhadap data yang telah dikumpulkan sesuai dengan rumusan masalah penelitian dengan memakai kerangka konsep dan teori, dan ada kemungkinan untuk proses dialektik teori.

1.1 Data Hasil Wawancara:

Nara Sumber terdiri dari:

Kepala desa

Tokoh Adat

Pemilik Lahan Pengeboran

Masyarakat Adat Setempat :

Organisasi Kepemudaan

Camat Satarmese

Anggota DPRD Manggarai Tengah

Wakil Bupati Manggarai Tengah

1. Kepala Desa Lungar

a. Tanya: Ada berapa titik pengeboran di desa Lungar?

Jawab: *“Untuk titik pengeboran di desa lungar ada 4 titik itu ditahap pertama belum tau selanjutnya dalam arti survey tahap pertama terdapat 4 titik”.*

b. Tanya: Sejauh mana kordinasi pemerintah dengan kepala desa?

Jawab: *“Terkait kordinasi sejak kepala desa saat ini belum menjabat menjadi kepala desa kurang lebih di tahun 2017 dan ketika tahun 2019 ada penyampain dari pemerintah bahwasannya di Poco Leok akan terjadi pemboran geothermal untuk kerja sama dengan pemerintah daerah baik dalam artian kordinasi dengan pemerintah daerah tidak berjalan lancar baik dalam artian kordinasi dengan pemerintah daerah tidak berjalan lancar”*

c. Tanya: Bagaimana pendapat masyarakat terhadap proyek geothermal?

Jawab: *“Pendapat masyarakat secara umum bahwasannya masyarakat sebagian besar menolak terhadap proyek geothermal dan seiring waktu yang berjalan dengan adanya sosialisasi tidak terdapat ada yang mendukung dan juga menolak (masyarakat pada umumnya diam) dan dalam proses pelaksanaannya munculah penolakan dari masyarakat adat”.*

d. Tanya : Sejauh mana pendekatan Pemerintah terhadap masyarakat?

Jawab: *“Setelah ada penolakan Pemerintah mengambil sikap dengan mendatangi setiap Gendang yang ada di Poco Leok kususnya desa Lungar ada 7 Gendang di desa Lungar sudah di datangi oleh Pemerintah Daerah Bersama datangi oleh Pemerintah Daerah bersama Camat, dan dari ke 7 Gendang yang ada di desa Lungar cuman ada 1 Gendang saja yang menolak yakni Gendang Lungar dan untuk pemilik lahan sebagian besarnya menerima, hanya saja masyarakat adat pada umumnya yang menolak tetapi ada juga masyarakat ada yang menerima”.*

e. Tanya: Bagaimana peran Kepala Desa dalam menyikapi proyek geothermal?

Jawab: “ Pemerintah Desa selalu berpihak terhadap masyarakat dan hal yang dilaksanakan Pemerintah Desa cuman sekedar menyampaikan apa yang sudah diperintahkan dari Pemerintah Daerah, didisisi lain pada saat Bupati mengunjungi Desa Lungar untuk mendengarkan secara langsung apa yang menjadi keresahan masyarakat, tetapi pada saat itu masyarakat menolak kehadiran Bupati dengan narasi menolak kehadiran geothermal bukan masyarakat tetapi pada saat itu masyarakat menolak kehadiran Bupati dengan narasi menolak kehadiran geothermal bukan menolak kedatangan Bupati, dan dari beberapa Gendang ini Gendang Mesir yang sebagian banyak masyarakatnya menerima dan di gendang Lungar mayoritas masyarakatnya menolak proyek geothermal ini”.

Kepala Desa Lungar



(Sumber: Florentino, 2023)

2. Masyarakat yang Menolak

- a. Tanya: Bagaimana peran Kepala Desa dalam proyek geothermal?

Jawab: “awal mula survey terkait persoalan geothermal ini tidak lewat desa, tetapi dengan berjalan waktu mulcul sedikit respon dari masyarakat terhadap proyek geothermal ini (para survey) setelah ada sedikit gerakan dari masyarakat, baru mereka mendatangi Pemerintahan Desa kurang lebih di tahun 2020. Pada tahun 2020 barulah Pemerintah Desa mengambil bagian

terhadap proyek geothermal. Sedangkan dari masyarakat sendiri melihat Kepala Desa juga bagian dari pengembangan PLTP Ulumbu. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Desa, mereka juga menolak terhadap proyek geothermal ini hanya saja Pemerintah desa beranggapan bahwasannya mereka juga masuk dalam struktur pemerintahan atau dengan kata lain perpanjangan tangan dari pemerintah daerah yang mengakibatkan keterpaksaan untuk menerima”.

b. Tanya: Sejauh mana pendekatan Pemerintah kepada masyarakat terhadap proyek geothermal ?

Jawab: : “Pada awal tahun 2017 ada sosialisasi hanya saja bukan dari Pemerintah Daerah melainkan dari pihak PLN dan setelah itu mereka mendatangkan Pemerintah juga untuk melakukan sosialisasi. Dalam proses sosialisasi awalnya juga hanya melibatkan beberapa pihak dan juga hanya menyajikan informasi yang selayaknya dalam pengertian hanya menyajikan soal hal hal yang positif. Sehingga masyarakat bertanya-tanya juga melihat fakta yang terjadi. Contoh nyata di Ulumbu sendiri terdapat 3 titik pengeboran yang dimana hanya bisa dipakai . Jadi kami sebagai masyarakat mempertanyakan mengapa 2 nya tidak bisa, tapi tidak ada penjelasan dari pemerintah maupun pihak PLN. Pemerintah juga tidak pernah memberi sosialisasi dari dampak Ulumbu yang jadi saat ini dan menurut masyarakat setempat, mereka melihat sudah sangat berdampak, dampak awalnya pada masa pemboran awalnya tidak sebesar saat ini dan dampak berikutnya perekonomian juga berdampak akibat tumbuhan yang di tanam mati dan juga sudah mulai muncul semburan semburan air panas”.

c. Tanya: Apakah ada proses penolakan dari warga sekitar?

Jawab: *“Untuk proses penolakan sudah beberapakali masyarakat setempat dan juga masyarakat ada yang diwilayah luar juga sudah sering melakukan aksi penolakan. Contoh penolakan yang dilaksanakan masyarakat adat setempat, terjadi pada saat kedatangan Bupati ke gereja di Gendang Lungar. Saat itu masyarakat adat menolak kehadiran Bupati dan menuntut supaya Bupati harus mencabut kebijakan tersebut. Alasan penolakan karena mereka melihat topografi dan yang kedua Poco Leok ialah tanah adat yang dimana masyarakat mengatakan “Gendang one liko peang” yang berarti gendang itu sama halnya dengan ruma adat lingko sama dengan kebun, mata air waiteku, natas watelaba yang berarti taman untung bermain dan juga ada compang taku yang berarti tempat untuk masyarakat adat berbicara atau menyampaikan sesuatu dengan leluhur. Yang menjadi persoalan kegiatan geothermal ini ada di lingko maka Gendang atau rumah adat itu tidak ada gunanya dan jika salah satu dari 5 pilar ini dirusakan maka budaya itu sudah mulai berkurang atau terkerus dan juga sudah mulai memudar dan juga apa artinya Gendang one kalau tidak ada lingkonya. Berikutnya ialah dampak sosial bagi masyarakat setempat misalnya dengan kehadiran geothermal ini sudah mengakibatkan perpecahan di antara masyarakat yang dimana ada yang setuju dan juga ada yang menolak. Selanjutnya berdampak bagi masyarakat diluar Poco Leok karena berkaitan dengan air yang dimana air menjadi sumber kebutuhan utama seluruh makhluk hidup. Geothermal ini sendiri pasti mencari matair besar untuk proses membangkit listrik dan sirkulasinya air akan kembali ke tanah lagi dimana pastinya air ini sudah tidak bersih lagi karena sudah tercampur bahan kimia”.*

d. Tanya: Bagaimana keterlibatan tua adat terhadap proyek geothermal?

Jawab: *“Untuk di Desa Lungar ada 7 Gendang dan sebagian besar mereka menolak hanya beberapa saja yang menerima karena para tua adat lebih melihat ke dampak budaya. Ada bukti juga karena sudah berbicara juga secara langsung dan kebanyakan mereka menolak”.*

e. Tanya: Bagaimana pandangan masyarakat terhadap proyek geothermal?

Jawab: *“Pandangan kami sebagai masyarakat beranggapan bahwasannya kegiatan geothermal ini sangat berdampak bagi masyarakat setempat. Dengan kata lain dampak negatifnya sangat besar dari proyek geothermal ini. Salah satu alasan karena melihat topografi yang ada di Poco Leok. Faktanya ketika belum ada pemboran saja sudah ada longsor di wilayah tersebut”.*

Masyarakat yang Menolak



(Sumber: Florentino, 2023)

3. Masyarakat yang Menerima

a. Tanya: Bagaimana peran Kepala Desa dalam proyek geothermal?

Jawab: *“Secara khusus Pak Kepala Desa Lungar menerima proyek geothermal ini. Hanya mungkin karena jabatan politiknya di tingkatan desa, menjadikan Pak Kepala Desa agak sedikit sungkan untuk mengakuinya. Sejauh ini Pemerintah Desa tidak pernah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Sering melakukan sosialisasi hanya dari pihak perusahaan yang dalam hal ini ialah PLN. Peran Pemerintah Desa hanya memfasilitasi pihak PLN untuk melakukan sosialisasi”.*

b. Tanya: Sejauh mana pendekatan Pemerintah kepada masyarakat terhadap proyek geothermal ?

Jawab: “ Pemerintahan Daerah kurang lebih 3 sampai 4 kali datang ke lokasi dan yang datang biasanya asisten di bagian ekonomi untuk sosialisasi. Pada saat Bupati yang datang, banyak masyarakat menolak”.

c. Tanya: Apakah ada proses penolakan dari warga sekitar?

Jawab: “Pada saat Bupati datang, ada penolakan dari masyarakat, dan pada saat kedatangan Bupati juga bupati bertanya apa yang menjadi alasan mengapa masyarakat menolak. Masyarakat tidak memberi alasan mendasar apa yang menyebabkan masyarakat itu menolak. Akan tetapi narasumber ini menerima, dengan alasan bahwasannya warga atau masyarakat yang menerima ialah supaya bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan juga proyek geothermal ini juga bisa mensejahterakan masyarakat”.

d. Tanya: Bagaimana keterlibatan tua adat terhadap proyek geothermal?

Jawab: “ Kalau tua tua Gendang Mesir sangat setuju terhadap proyek geothermal ini”.

e. Tanya: Bagaimana pandangan masyarakat terhadap proyek geothermal?

Jawab: “Pandangan yang pertama sangat baik karena bisa mensejahterakan masyarakat. Dengan kata lain, baru baru saja masyarakat Gendang Mesir bisa menikmati arus listrik. mungkin karena ada tambahan daya Ulumbu diharapkan kedepannya desa ini bisa maju dan bisa bersaing dengan desa desa lain”.

Masyarakat yang Menerima



(Sumber: Florentino, 2023)

4. Tokoh Adat yang Menolak

a. Tanya: Ada berapa titik pengeboran di Desa Lungar?

Jawab: *“Kurang lebih ada 4 titik. Tetapi masyarakat Gendang Cako hanya mengetahui adanya 1 saja, dimana jarak pengeboran dan pemukiman warga tidak terlalu jauh”.*

b. Tanya: Bagaimana pendapat masyarakat terhadap proyek geothermal?

Jawab: *” masyarakat berpendapat bahwasannya proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah saat ini untuk mensejahterakan masyarakat kecil dimana arus listrik akan di drop full ke Manggarai Barat. Selanjutnya akan di over/dialihkan ke Labuan Bajo demi pembangunan kota Labuan Bajo menjadi kota premium. Disisi lain kami sebagai masyarakat, khususnya masyarakat Gendang Cako bukannya iri terhadap mereka yang mempunyai lahan, namun prihatin karena mereka didesak oleh Pemerintah untuk segera menyetujui supaya lahan mereka diberikan ke Pemerintah supaya proyek ini bisa segera berjalan”.*

c. Tanya: Sejauh mana pendekatan pemerintah terhadap masyarakat?

Jawab: ” Bagi Pemerintah, mereka datang untuk survey dan mendesak supaya proyek ini berjalan tanpa harus memikirkan soal dampak dan sebagainya. upaya pemerintah desa mendapatkan persetujuan dari masyarakat, Aparat Desa mendatangi dari rumah ke rumah, meminta tandatangan tanpa ada kejelasan untuk apa tandatangan ini diberikan sehingga masyarakat di Gendang Cako akhirnya dengan tegas menyatakan penolakan”.

d. Tanya: Apa alasan menolak?

Jawab: “Alasan penolakan yang pertama ialah lokasi pemboran sangat dekat dengan permukiman masyarakat (kurang lebih 100 meter). juga dirasakan sangat mengganggu kesehatan dan juga secara tidak langsung sangat mengganggu terganggu pekerjaan masyarakat. Demikian juga masyarakat khawatir jika hasil pertanian mereka terganggu. Alasan yang mendasar ialah soal budaya, dimana masyarakat mengatakan tidak menjadi masalah masyarakat berpindah tempat tetapi bagaimana dengan leluhur mereka yang dalam hal ini kepercayaan terhadap budaya masih sangat terjaga”.

Tokoh Adat yang Menolak



(Sumber: Florentino, 2023)

5. Tokoh Adat Yang Menerima

a. Tanya: Bagaimana pendapat masyarakat terhadap proyek geothermal?

Jawab:”.... sebagian masyarakat menerima dikarenakan masyarakat di daerah ini sebagian besarnya sudah memahami terkait proyek geothermal ini. Disisi lain masyarakat ingin maju dan berpikir mungkin dengan adanya proyek ini kedepannya desa terkait bisa sedikit lebih maju dan juga supaya anak cucu atau sebageian masyarakat bisa bekerja di perusahaan itu. Dengan kata lain mereka berharap dengan adanya proyek geothermal ini tingkat pengangguran di wilaya itu agak sedikit berkurang, atau masyarakat berharap pekerja lokal harus seimbang dengan pekerjaan dari luar”.

b. Tanya: Sejauh mana pendekatan Pemerintah terhadap masyarakat?

Jawab: “Beberapa bulan lalu pemerintah bersama PLN datang atau turun langsung ke lokasi untuk sosialisasi terkait proyek geothermal ini. Tetapi ada juga masyarakat yang tidak menerima. Namun kelompok masyarakat yang mendukung kembali mencari tau supaya pemerintah juga tidak semenahmenah terhadap masyarakat. Namun setelah pihak PLN dan Pemerintah Daerah

melakukan sosialisasi maka masyarakat Gendang mesir sebagian besar menerima proyek ini dikarenakan merujuk pada sila ke lima dalam Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan berlandaskan ini maka masyarakat setempat beranggapan bahwasannya arus listrik ini juga sangat membantu masyarakat pada umumnya “.

c. Tanya: Bagaimana peran tokoh adat dalam menyikapi proyek geothermal?

Jawab: “... sangat menerima karena sudah ada sosialisasi yang bisa meyakinkan masyarakat khususnya Gendang Mesir terkait proyek geothermal ini. Terkait pemilik lahan terdapat kurang lebih 28 pemilik lahan di Gendang Mesir mayoritas sudah setuju untuk dilaksanakan pengeboran. Namun warga juga menyajikan permintaan kepada pemerintah supaya di buat jalan baru karena dengan adanya jalan baru maka dengan otomatis lahan yang dipakai akan lebih besar dan bisa jadi akan ada kenaikan harga lahan dalam proses pembangunan proyek geothermal ini”.

Tokoh Adat Menerima



(Sumber: Florentino, 2023)

6. Nara Sumber Pemilik Lahan

a. Tanya: Bagaimana pandangan pemilik lahan dalam menyikapi proyek geothermal?

Jawab: “ Pemilik lahan selaku warga Negara Indonesia yang diamana hidup dibawa aturan Negara bukan sedang menjual tanah hanya karena tanah ini dibutuhkan untuk kepentingan umum. Sebagai warga Negara maka wajib untuk memberikannya demi kepentingan umum sepanjang program pemerintah ini mensejahterakan masyarakat dan pemilik lahan menyatakan sikap mendukung program geothermal ini”.

b. Tanya: Bagaimana pemilik lahan menyikapi masyarakat yang menolak?

Jawab:” Dalam hal ini tidak mempunyai wewenang untuk memberi sosialisasi dan sebagainya yang dikarenakan program ini ialah program pemerintah dan jika ada yang menolak itu diluar dari tanggung jawab sebagai pemilik lahan”.

c. Tanya: Terkait titik pengeboran dilahan pemilik itu kira kira seperti apa?

Jawab: “Kaulau di filpet F tidak menjadi persoalan karena masyarakat sudah diberikan sosialisasi oleh pihak PLN dan pemerintah daerah dan pemerintah desa dan juga bukan cuman di filpet F yang di adakan sosialisas melainkan diseluruh wilaya Poco Leok hanya masyarakat secara khusus tidak mengetahui apa alasan mendasar bahwasannya banyak masyarakat yang menolak dikarenakan pada saat kunjungan Bupati, ketika Bupati menanyakan apa yang menjadi alasan atau apa yang mengakibatkan masyarakat Kalau di filpet F tidak menjadi persoalan karena masyarakat sudah diberikan sosialisasi oleh pihak PLN dan pemerintah daerah dan pemerintah desa dan juga bukan cuman di filpet F yang di adakan sosialisas melainkan diseluruh wilaya Poco Leok”.

Tanya: Apa alasan mendasar menerima geothermal ini?

Jawab: “Yang pertama masyarakat Dajang belum merasakan penerangan walaupun ada di Ulumbu tetapi kami yang di seputaran sini belum merasakan, yang dimana saya sebagai pemilik lahan juga membutuhkan penerangan dan ketika menolak maka kembali lagi kita melihat di Ulumbu yang dimana mereka diseputaran sana sudah merasakan dampak baiknya dari geothermal ini maka dari itu pemilik lahan merasa ini baik untuk masyarakat sekitarnya maka menyetujui lahan dipakai untuk proyek geothermal demi kepentingan masyarakat banyak dan pendekatan yang dilaksanakan pemerintah daerah terhadap pemilik lahan sudah meraih akhir yang dimana pemilik lahan pada umumnya sudah menyetujui proyek geothermal ini”.

Pemilik Lahan



(Sumber: Florentino, 2023)

7. Nara Sumber Organisasi Kepemudaan (PMKRI)

a. Tanya: Bagaimana pandangan PMKRI terkait proyek geothermal?

Jawab: *“Pada intinya mahasiswa tidak anti pembangunan karena pembangunan yang dibuat oleh Pemerintah pada dasarnya untuk kesejahteraan dan kemajuan daerah. Tetapi ada hal hal yang perlu seperti apakah pembangunan itu bertujuan untuk membangun sebuah daerah khususnya di di wilayah Poco Leok ? Untuk masyarakat sekitar proyek geothermal ini, dan sejauh ini Pemerintah tidak memberi kepastian apa yang diperoleh masyarakat Poco Leok? Mahasiswa melihat jangan sampai masyarakat wilayah poco Leok menjadi korban. Selanjutnya mengenai keberadaan geothermal Poco Leok ini ialah pengembangan dari geothermal Ulumbu, di mana pada saat perencanaan di tahun 2012 pemerintah beserta pihak PLN mengatakan ketika geothermal ulumbu ini berhasil dilaksanakan maka kan menyuplai listrik untuk seluruh Flores. Pertanyaan mendasarnya apakah sejauh ini hal itu sudah berhasil dilaksanakan ? Jawabannya memang belum dikarenakan faktanya sampai saat ini masyarakat seputaran Ulumbu juga belum mendapatkan dampak dalam arti listrik tidak menyebar secara merata di wilaya ini dan di sekitarnya sehingga di buatlah perluasan yang dimana Poco Leok menjadi targetnya dan di Ulumbu sendiri terdapat 3 titik pengobran yang dimana yang berhasil dilaksanakan cuman 1 titik dan dua titik lainnya gagal. Berangkat kegagalan yang dilaksanakan di Ulumbu menjadikan masyarakat dan juga mahasiswa merasa ragu kembali dengan proyek geothermal ini yang dimana takut adanya dampak negatif disuatu hari misalnya dampak kesehatan, ekonomi dan juga lingkungan hidup serta dampak budaya. Pada saat PMKRI melakukan riset mengenai geothermal ini pengakuan masyarakat bahwasannya tanpa adanya geothermal ini mereka sejahtera dan*

ketika geothermal ada itu yang menjadikan masyarakat sekarang menjadi terpecah dikarenakan ada yang berpihak dan ada juga yang menolak. Jika berbicara mengenai budaya, ada budaya Manggarai yakni budaya Lonto Leok yang sangat kental dengan kehadiran geothermal ini sudah tidak ada lagi misalnya masalah yang terjadi saat ini yang dimana budaya Lonto Leok ini bertujuan untuk duduk bersama mengumpulkan upeti demi masa depan anak tetapi saat ini sudah menghilang artinya ada perubahan sosial yang terjadi. Dengan kata lain pandangan mahasiswa tidak menginginkan hal ini terjadi karena mengakibatkan budaya itu akan hilang maka dari sisi OKP PMKRI dengan sangat tegas mengatakan menolak terhadap proyek geothermal ini dan disisi lain melihat juga topografis wilayah yang di mana wilayah itu rawan longsong dan juga mempunyai potensi banjir. Dan siapakah yang menjadi target utama dari proyek geothermal ini yang jelas tidak semata-mata untuk masyarakat lokal melainkan untuk warga Negara lain dikarenakan pembangunannya bersumber dari Negara lain yakni Jerman dengan teknisnya lewat bawala, dan berikutnya dalam konteks budaya dalam budaya Manggarai terdapat 5 pilar kehidupan orang Manggarai yakni baru pate kaeng, natas bete labar, huma bate duat, compang bate takung dan wae bati teku ini ialah 5 pilar yang dimana sangat erat betul dengan kehidupan orang Manggarai dan ketika salah satunya dihilangkan maka dengan sendirinya budaya itu akan hilang dan orientasi dari pembangunan geothermal ini ialah perusakan lingkungan dan disisi lain pembangunan ini ada di lahan warga yang dimana istilah uma bate duat ini dengan sendirinya akan hilang karena berkaitan erat dengan lingkungan dan juga berkaitan dengan compang bate takung ini juga ialah marwa dari satu kampung dan juga jika pengeboran itu terjadi maka marwa dari kampung itu akan hilang berikutnya terkait dengan AMDAL yang dimana sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai kajian AMDAL. Dan disisi lain juga pemerintah daerah yang diwakili oleh Bupati juga telah menetapkan atau mengeluarkan surat keputusan terkait proyek ini dengan tidak melihat secara keseluruhan apa yang akan terjadi di wilayah POCO Leok ini dan jika berbicara kronologinya pada tahun 80-an pihak PLN sudah melakukan riset terkait geothermal ini hanya saja tanpa sepengetahuan masyarakat sehingga mereka dibiarkan saja untuk melakukan survey lokasi. Dan pada tahun 2017 dilaksanakan kembali survey dengan metode pendekatan terhadap masyarakat dan warga saat itu juga menyetujui karena belum mengetahui motif dan tujuan sebenarnya dari pihak PLN ini. dan ketika masyarakat tau tujuannya maka ada lah bentuk penolakan yang dilaksanakan sebagian besar masyarakat wilayah POCO Leok tersebut”.

b. Tanya: Sejauh mana keterlibatan PMKRI kepada masyarakat dan proyek geothermal?

Jawab: *“PMKRI selalu mengawal kasus geothermal ini makan keterlibatan PMKRI sebagai organisasi pergerakan PMKRI mengikuti diskusi public yang dilaksanakan oleh pemerintah dan PLN dan secara jelas dan tegas PMKRI menyatakan pendapat bahwasannya PMKRI menolak dengan alasan budaya, ekonomi kesehatan dan juga dampak terhadap lingkungan sekitar dan setehan itu PMKRI intes melakukan advokasi, menyajikan pengarahannya terhadap masyarakat terkait proyek geothermal ini”*.

Ketua Presidium PMKRI Cab. Ruteng



(Sumber: Florentino, 2023)

8. Camat Satarmese

a. Tanya: Bagaimana kronologi yang terjadi di lapangan akibat proyek geothermal?

Jawab: *“Terkait dengan pengembangan PLTP ulumbu unit 5 dan 6 dua kali 20 MW di poco leok dan program ini mulai disosialisasikan pada tahun 2017 dan program ini berdasarkan penetapan dari menteri ESDM pada tahun 2017 dilanjutkan dengan ijin prinsip dari gubernur NTT pada saat awal program ini masuk respon cepat untuk melakukan sosialisasi oleh tim PLN yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan pemerintah kecamatan dan meamang sosialisasi pada waktu itu terpusat di kantor desa dan mengundang seluruh stakeholder yang berada di wilayah poco leok, dan dalam perjalanan waktu diawal program ini masuk tidak ada penolakan dari masyarakat seiring berjalan waktu dari 2017 sampai awal 2021 sudah mulai mendengarkan bahwasannya yang mulai menolak yang dimana penolakan ini berkaitan dengan tempat atau titik pengeboran dengan alasan pembangunan ini masuk dalam tanah masyarakat yang dimana tanah itu dipakai untuk mata pencarian masyarakat setempat salah satu contoh terjadi di titik G atau WELPET G yang*

terletak di desa mocok yang dimana titik itu masuk dalam lingkungan yang dimana lokasi itu selalu dipakai untuk upacara adat dan di titik F terletak di dekat kuburan masyarakat dan juga leluhur hal itu menjadi alasan awal terjadinya penolakan dan hal ini pemerintah kecamatan mencoba bangunn komunikasi dengan masyarakat tetapi sebagai fasilitasi untuk pihak pelaksana yakni PLN supaya titik ini diperhatikan dan pihak PLN juga menyanggupi itu sehingga melakukan survey lagi sehingga ditetapkan titik baru yakni di desa mocok itu dipindahkan ke ulumbu eksistik yakni di welpet G dan yang F di cama digeser ke barat sehingga masuknya diwilaya gendang Mesir. Dan alasan keberikutnya masyarakat menolak ialah munculnya kecemasan kecemasan melihat topografi, lumpur lapindo, kesehatan, karena dalam benak masyarakat mereka beranggapan geothermal ini ialah gas sedangkan yang dihasilkan adalah panas atau uap air dan juga berkaitan dengan kerusakan material rumah, dan juga yang terakhir merusak budaya dan tradisi orang manggarai, ketika pemerintah desa, kecamatan dan daerah mendengar itu pemerintah meminta pihak PLN untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait proyek geothermal dengan dilakukannya sosialisasi, pembuatan format dengan tujuan tidak terpusat saja disatu titik dalam nuansa tabe gendang dan dalam nuansa tabe gendang ini ada beberapa poin yang disampaikan yang pertama ialah sebagai orang manggarai yang berwilaya jika ada hal yang salah dilaksanakan diawal maka tabe gendang ini ialah media untuk melakukan permohonan maaf, inti kedua dari tabe gendang yakni meminta ijin supaya pihak PLN ini bisa melakukan aktivitas di wilaya poco leok dan yang ke tiga ditabe gendang ini ialah untuk menyajikan sosialisasi terkait dengan apa itu geothermal dan tahapan tahapannya mulai dari awal proses geothermal sampai dengan fungsi dan sisi positifnya dari geothermal dan selanjutnya berkaitan dengan partisipasi bahwasannya jadwal tabe gendang ini dilaksanakan kurang lebih 2 minggu dan cuman dua gendang yang menolak dari 14 gendang, dan adari ke 12 gendang yang menerima ini dengan terang terangan mengatakan penolakan dan sisah 9 gendang menyatakan menerima dengan bersarat yakni memperhatikan pasokan kelistrikan yang ada di wilaya poco leok dan selanjutnya program ini juga ialah program strategis nasional untuk menjawab RPJM 100% desa baristik di Indonesia dan wilaya poco leok ialah salah satu wilaya yang mempunyai potensi panas bumi, terkait dengan kebutuhan listrik bahwasannya listrik di manggarai kebutuhannya adalah 13 stenga M sedangkan pasokan di ulumbu cuman 7 setengah artinya ada kekurangan 6 M dan – 6 M ini di isi dari kelistrikan rangko dan sumber sumber lainnya. Sehingga munculnya pengembangan PLTP Ulumbu dengan tujuan yang jauh lebih besar. Dan berkaitan dengan

kecemasan masyarakat pemerintah meminta PLN untuk menjawab dan PLN menyanggupi dengan mendatangkan ahli ahli yang berkaitan dengan lingkungan dan lain”.

Camat Satarmese



(Sumber: Florentino, 2023)

9. Ketua DPRD Manggarai

a. Tanya: Bagaimana pandang DRPR terkait proyek geothermal?

Jawab: *“Proyek geothermal ini merupakan proyek nasional dan masalah yang terjadi saat ini juga seharusnya pihak pemerintah pusat harus bisa mengatasinya dikarenakan yang menjadi konsumen bukan cuman masyarakat atau warga manggarai, terkait persoalan yang terjadi di poco leak DPRD kabupaten Manggarai juga tidak mengetahui apakah sudah dilaksanakan sosialisasi atau belum terkait hak milik atas tanah kalau di dengar dari PEMDA bahwasannya seluruh itu sudah dilaksanakan tetatpi masi ada juga yang mengklaim yaitu ada beberapa gendang yang kurang lebih 3 gendang yang belum disposisi di meja Ketua DPRD Kabupaten Manggarai karena cuman tembusan saja ke DPRD tujuannya ialah bupati dan kementian yang memuat bahwasannya ada beberapa gendang yang menolak terkait proyek geothermal ini lewat ketua DPRD juga belum mengetahui alasan mendasar mengapa mereka menolak, da nada pun alasan mengapa DPRD tidak terjun langsung ke lapangan karena DPRD Kabupaten Manggarai merasa mereka cuman sebagai fungsi pengawasan untuk pemerintah daerah yang diman pemerintah daerah harus bisa menyelesaikan maslah yang terjadi, sehingga tidak menjadi persoalan di tingkatan pusat. Menurut Bupati Manggari semuanya sudah selesai tetapi faktanya masi ada pihak yang mengklaim, menurut ketua DPRD Manggarai pemboran geothermal harus dilaksanakan karena mengingat*

manggarai barat yang saat ini sedang menjadi tempat yang banyak pengunjunya dengan tujuan supaya dampak positif juga bisa dirasakan di manggarai tengah”.

- b. Tanya: Bagaimana peran DPRD sebagai representasi dari rakyat dalam mengatasi persoalan geothermal ini?

Jawab: *“Tugas DPRD hanya untuk mengawasi dan memberi solisi lewat pemikiran ke pemerintah daerah dan disisi lain DPRD tidak turun langsung dikarekan tidak mendapat surat resmi dari masyarakat yang menolak proyek geothermal ini sehingga menjadikan DPRD tidak turun atas nama lembaga tetapi ada juga anggota dewan yang turun tapi bukan membawa nama lembaga melainkan membawa nama pribadi dengan tujuan dan kepentingan PEMILU 2024”.*

- c. Tanya: Sejaumana kordinasi antara pemerintah daerah kepada DPRD terkait proyek geothermal ini?

Jawab: *“ Sejauh ini tedak ada kordinasi dari pemerintah daerah mengenai langka langka atau strategi dalam proyek geothermal ini”.*

- d. Tanya: Sejauh mana pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD Manggarai terhadap proyek geothermal?

Jawab: *“Yang pertama proyek geothermal ini bukan ialah proyek daerah melainkan proyek pemerintah pusat artinya fungsi DPRD hanya untung pengawasan uang Negara yang ada didaerah manggarai tetapi [eran DPRD hanya menyajikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah tetapi berkaitan dengan geothermal ini langsung dengan pusat yang dimana DPRD Manggari tidak punya hak lebih untuk mengawasi karena dana yang diberikan bukan dari pemerintah daerah melainkan dari pemerintah pusat sendri kepada pihak PLN”.*

Ketua DPRD Kab. Manggarai Tengah



(Sumber: Florentino, 2023)

10. Nara Sumber Wakil Bupati Manggarai

a. Tanya: Bagaimana Kronologi ataupun komunikasi yang dibangun pemerintah?

Jawab: *“Pada tahun 2017 pihak pemerintah pusat berkordinasi terhadap pemerintah daerah, kecamatan bahkan sampai desa untuk memikirkan menetapkan beberapa titik potensial menjadi sumber energy panas bumi dan tujuan ini bukan hanya untuk masyarakat manggarai semata melainkan untuk floreses secara umum dan juga pemerintah selali memikirkan supaya diskusi itu tetap ada dan terus berjalan dan faktanya pada saat awal semuanya berjalan dengan baik dan memakai etika buda orang manggarai yakni lonto leok atau duduk melingkar semuanya itu jalan dan faktanya tidak terjadi masalah dan perkembangan menuju 2021 sampai saat ini mulai muncul perbedaan yakni adanya penolakan dan dari awal ada sebagian kecil orang yang tidak sependapat tetapi mereka hanya membutuhkan penjelasan secara teknis, yang dimana secara kusus juga terhadap pemilik tanah juga dilaksanakan diskusi privat ada juga diskusi kolektif dan semuanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan juga pihak PLN, karena melihat kondisi dan laporan dari pemerintah desa dan kecamatan bahwasannya seluruh prosedur sudah dilaksanakan maka pemerintah daerah mengeluarkan SK mengenai penetapan lahan, tetapi sebelum penetapan lahan pemerintah daerah meminta supaya melakukan advokasi lahan dan hasilnya ataupun laporan yang diterima semuanya berjalan baik. Tetapi melihat perkembangan akhir munculnya penolakan secara besar besaran yang dilaksanakan oleh masyarakat poco leok yang dimana awalnya mereka menerima dengan data yang di ambil dari daftar hadir setiap kali sosialisasi tetapi sekarang mereka menolak, tetapi ada juga orang-orang yang tetap konsisten terhadap sikap awal yakni setuju dan mengerti dengan penjelasan yang diberikan pihak PLN alasan geothermal ini menjadi heboh pada saat kunjungan pak bupati ke lokasi dan pada saat itu dibuatlah pergerakan yang*

dimana pihak pemerintah juga tidak mengetahui siapa actor yang bergerak. Melihat situasi yang semakin memanas maka pemerintah perlu melakukan diskusi lagi terhadap masyarakat adat yang sampai saat ini belum mengetahui fungsi serta manfaat dari geothermal ini”.

Wakil Bupati Manggarai



(Sumber: Florentino, 2023)

4.1.1 Foto Lokasi Pemboran:

Titik Pengeboran Gendang Ledak



(Sumber: Florentino, 2023)

Titik Pengeboran Gendang Mesir



(Sumber: Florentino, 2023)

Kantor Desa Lungar



Peta Desa Lungar



(Sumber: Florentino, 2023)

5.2 Deskripsi Temuan

5.2.1 Temuan

Adapun temuan yang diperoleh dari penelitian ini yakni dampak terhadap berbagai aspek kehidupan seperti pertanian, sosial budaya, kesehatan, dan. Berdasarkan hasil penelitian ada empat titik yang menjadi target lokasi pengeboran, yakni gendang Cako, gendang Mesir.

5.2.2 Dampak Terhadap Aspek Pertanian

Dampak Negatif akibat pembangunan proyek ini ialah sebagai berikut :

1. Uap air, air panas, dan berbagai kontaminan membentuk uap panas bumi yang keluar dari sumur. Salah satu strategi untuk memitigasi dampak ini ialah dengan memisahkan polutan (belerang) di separator dan peralatan pembersih.
2. Belerang yang dipisahkan harus diolah dan dimanfaatkan karena jika dibuang sembarangan—misalnya dibuang ke sungai—akan menyebabkan pencemaran air di daerah pedesaan yang airnya ialah sumber kehidupan.
3. Peningkatan tingkat getaran dan kebisingan. Hal ini bisa dihindari dengan menutup turbin di dalam ruangan dan mengelilingi generator dengan pepohonan.
4. Rawan kecelakaan, hal ini bisa dihindari dengan menerapkan peraturan K 3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) yang ketat, seperti pembatasan akses bagi individu yang tidak mampu. Pedoman yang ketat seperti perlunya pekerja memakai helm, pakaian proyek, septum kulit tebal, kaca mata kerja, masker, dan penutup telinga saat berada di dekat turbin.

Selain dampak negatif ada juga dampak positif yang ditimbulkan dari pembangunan proyek geothermal.

1. Kemudahan

Panas atau suhu tinggi yang dihasilkan oleh panas bumi dikenal dengan istilah energi panas bumi. Sebagai sumber energi, hal ini relatif mudah dipahami, namun memerlukan energi untuk diubah menjadi bentuk lain yang bermanfaat. Mayoritas lampu di Indonesia ditenagai oleh listrik. Tidak ada permasalahan teknologi dalam penggunaan energi panas bumi karena proses perpindahan energi panas menjadi energi listrik telah terbukti di seluruh dunia. Selain itu, jelas bahwasannya Indonesia membutuhkan transportasi dan penerangan.

2. Menyelamatkan lingkungan

Menghasilkan energi memakai panas bumi atau tenaga nyata akan bermanfaat bagi lingkungan. Hal ini disebabkan oleh tingkat emisi yang sangat rendah dari pembangkit listrik ini, yang menghasilkan listrik tanpa memakai bahan bakar.

3. Tidak membutuhkan pasokan bahan bakar

Setelah dilaksanakan berbagai macam penelitian dari segi perbandingan factor kapasitas, tenaga pembangkit listrik ini tertinggi dibandingkan pembangkit lainnya

Terlepas dari kenyataan bahwasannya beberapa orang menyatakan bahwasannya karena energi panas bumi berasal dari panas yang ditemukan di dalam bumi, maka panas bumi ialah sumber energi yang relatif ramah lingkungan. Namun, ada sejumlah kelemahan dalam penggunaan panas bumi. Selain itu, terdapat dampak negatif pembangkit listrik tenaga panas bumi terhadap deforestasi, erosi, berkurangnya air atau mata air tanah, keberadaan hutan lindung, dan penurunan permukaan tanah.

1.Sumber Daya Air

Pembangkit listrik dari panas bumi atau geothermal banyak membutuhkan air untuk dipakai sebagai pendingin. Karena untuk mengurangi pasokan air di daerah yang kering atau bahkan mengganggu ekosistem air.

Kontaminan seperti arsenik, antimon, dan boron ditemukan dalam larutan hidrotermal, yang menyebabkan kontaminasi air. Kanker pada manusia disebabkan oleh arsenik (As). Di daerah pemukiman yang air minumnya mengandung As tinggi, hal ini berkorelasi dengan tingginya angka penyakit kulit dan kanker. Tingkat bahaya antimon (Sb) mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan asthenium. Boron (B) dalam jumlah tinggi bisa menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia, termasuk penurunan kesuburan. Meskipun As, Sb, dan B ialah unsur alami, unsur-unsur ini bisa bergerak dan mencemari saluran air selama proses ekstraksi panas yang dipakai dalam pembangkitan energi panas bumi. Contoh polusi ini terjadi di Ladang Panas Bumi Balçova Turki.

2. Hasil Panen

Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi berdampak pada stabilitas tanah karena air diinjeksikan ke lapisan batuan kering yang sebelumnya tidak ada air. Pelepasan uap kering dan uap dalam skala kecil juga menyebabkan pelepasan karbon dioksida, nitrit, oksida, dan gas belerang dalam jumlah kecil, meskipun hanya sedikit sebesar 5%.

- 5.2.3 Aspek Terhadap Dampak sosial dan Budaya
Pembangunan dan eksploitasi pembangkit listrik geothermal bisa mempengaruhi masyarakat setempat. Proyek 26ersama26al bisa mengubah pola hidup

masyarakat, dan bisa mempengaruhi upaya hidup tradisional mereka. Ketidakpuasan masyarakat, rusaknya keamanan dan ketertiban sosial, menurunnya kesehatan masyarakat, kekhawatiran hidup dalam bayang-bayang bencana alam, gas beracun, kekeringan, dan potensi terjadinya kebakaran.

Berangkat kegagalan yang dilaksanakan di ulumbu menjadikan masyarakat dan juga mahasiswa merasa ragu kembali dengan proyek geothermal ini, yang dimana takut adanya dampak negative disuatu hari misalnya dampak kesehatan, ekonomi dan juga lingkungan hidup serta dampak budaya dan ketika geothermal 27ersama yang menjadikan masyarakatat sekarang menjadi terpecah dikarenakan ada yang berpihak dan ada juga yang menolak dalam pengertian sosial masyarakat pada saat ini sudah terpecah belah karena adanya perbedaan dalam pandangan, dan ketika berbicara mengenai budaya manggarai terdapat 5 pilar kehidupan orang manggarai yakni *baru pate kaeng, natas bete labar, huma bate duat, compang bate 27ersam* dan *wae bati teku* ini ialah 5 pilar yang dimana sangat erat betul dengan kehidupan orangga manggarai dan ketika salah satunya di hilangkan maka dengan sendrinya budaya itu akan hilang misalnya budaya manggarai *Lonto Leok* yang sangat kental, dengan kehadiran geothermal ini sudah tidak ada lagi misalnya masalah yang terjadi saat ini yang dimana budaya *Lonto Leok* ini bertujuan untuk duduk 27ersama mengumpulkan upeti demi masa depan anak tetapi saat ini sudah menghilang artinya ada perubahan social yang terjadi dengan kata lain sudah tidak punya rasa persaudaraan yang seperti adanya proyek geothermal dan masyarakat pada umumnya tidak menginginkan hal ini terjadi karena mengakiatkan budaya itu akan hilang.

5.2.4 Aspek Terhadap Dampak kesehatan
Penilaian menyeluruh terhadap dampak lingkungan dan kesehatan dari pengembangan dan eksplorasi proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi diperlukan di beberapa lokasi di Indonesia. Hal ini untuk melindungi keselamatan masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi baru pengembangan energi terbarukan.

Secara umum Penelitian ini menyoroti tentang dampak dengan adanya aktivitas pengembangan panas bumi atau geothermal yang dinilai merusak lingkungan sekaligus mengancam kesehatan masyarakat di sekitar lokasi.

5.3 Dialektika Konsep

5.3.1 Peran dan Sikap Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai sebagai bagian dari collaborative Governance sangat sentral dalam hal membahas mengenai kerjasama antar stakeholder yakni masyarakat dan tokoh adat untuk mengelola sumber daya panas bumi menjadi Tenaga Listrik yang berguna bagi kepentingan masyarakat. Hanya saling ketergantungan antar pihak atau pemangku kepentingan yang bisa melahirkan perlunya kerja sama dalam kerangka tata kelola kolaboratif. Sebuah proses yang mencakup kontak yang saling menguntungkan dan norma-norma yang disepakati antara masyarakat dan pemimpin adat setempat bisa dicapai lewat tata kelola kolaboratif. Tujuan yang bermanfaat bagi setiap pemangku kepentingan bisa dicapai dengan memakai sudut pandang tata kelola kolaboratif (Irawan, 2017).

Dengan memakai Model Collaborative Governance Ansell dan Gash bisa ditempuh jalan dalam beberapa tahap yaitu:

1. Starting Condition (Kondisi Awal)

Pada tahap awal dalam relasi antar pemerintah, masyarakat dan tokoh adat setempat yang mempunyai latar belakang dan kepentingan yang berbeda yang bisa terjadi perbedaan pandangan mengenai sebuah proyek pembangunan yang hendak dilaksanakan. Untuk mengatasi rintang awal ini, pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat yang bisa membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan sumber energi listrik berupa eksplorasi panas bumi yang potensial berada di lingkungan mereka.

2. Kepemimpinan Fasilitatif

Yang dimaksudkan dengan kepemimpinan fasilitatif ialah pemimpin, dalam hal ini ialah pemerintah dan tokoh masyarakat harus mempunyai sifat kepemimpinan kolaborative yang efektif yakni: a. mempunyai watak kepemimpinan dan kemampuan manajerial yang cukup mumpuni terhadap proses kolaborasi; b. Pemerintah harus bisa mengelola kemampuan ini terutama dalam pelaksanaan teknis yang kredibel. c. Pastikan kolaborasi mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan dengan upaya yang bisa dipercaya dan persuasif bagi setiap pemain.

3. Desain istitusional (Institutional Design)

Yang dimaksud dengan “desain kelembagaan” ialah prosedur dan pedoman mendasar dalam bekerja sama, khususnya yang berkaitan dengan validitas prosedur. Penting untuk ditekankan bahwasannya pemerintah harus transparan dan inklusif selama proses kemitraan.

4. Proses Kolaborasi (Collaborative Process)

Dalam proses kolaborasi harus lewat tahapan proses kolaborasi antara lain Merumuskan masalah, menentukan tujuan dan upaya mengimplementasikan. Tahapan membentuk kolaboratif melalui:

- a. Dialog tatap muka (Face to face) dengan masyarakat dan tokoh adat
- b. Membangun kepercayaan (Trust Building) kepada masyarakat dan tokoh adat
- c. Komitmen terhadap proses (Commitment to process), dengan teguh dan disiplin dalam menjalankan proses.
- d. Share Understanding, membangun saling pengertian akan manfaat dan tujuan sebuah pembangunan sumber energi berupa energi panas bumi.
- e. Hasil Sementara: Menunjukkan hasil sementara yang akan dicapai ketika proses pembangunan dilaksanakan.

Kemudian, sesuai dengan Clarkson (1995), ada dua kategori pemangku kepentingan: pemangku kepentingan primer (primer), seperti masyarakat, dan pemangku kepentingan sekunder, seperti pemerintah. pemangku kepentingan penting ialah mereka yang keterlibatannya mempunyai dampak signifikan terhadap kemajuan pembangunan. Pembangunan tidak bisa berlangsung secara berkelanjutan tanpa keterlibatan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang penting. Pemerintah daerah, atau pemangku kepentingan sekunder, ialah kelompok pemangku kepentingan yang terkena dampak oleh organisasi lain dan mempunyai pengaruh namun tidak memainkan peran penting dalam transisi pembangunan atau keberlanjutan pembangunan.

Menurut Clarkson, (Crosby, 1991) juga mengklasifikasikan pihak-pihak berdasarkan atributnya, khususnya: 1) pemangku kepentingan utama, atau komunitas lokal yang secara langsung mendapat manfaat atau terkena dampak negatif dari sebuah proyek atau program dan mempunyai kepentingan langsung di dalamnya; 2) pihak pendukung, atau pemangku kepentingan

sekunder, seperti infrastruktur daerah, yang berkepentingan namun tidak berkepentingan dengan kegiatan tersebut;

3) Pihak-pihak penting, termasuk pemerintah federal dan pemerintah daerah, yang mempunyai kapasitas hukum untuk mengambil keputusan.

Ackermann dan Eden membagi pemangku kepentingan ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kekuasaan dan kepentingan. Tujuan dari pemetaan ini ialah untuk mengkategorikan pemangku kepentingan berdasarkan bagaimana kekuasaan dan kepentingan mereka berhubungan satu sama lain (Ackermann & Eden, 2011). Kedua kelompok ini berlaku untuk pemerintah kota dan daerah setempat dalam konteks pengembangan listrik panas bumi.

5.3.2 Keberhasilan Collaborative Governance

Menurut DeSeve (Moore, 2009), ada delapan komponen penting yang bisa dipakai untuk mengukur seberapa baik kinerja sebuah jaringan atau kerjasama dalam tata kelola. Komponen-komponen ini terdiri dari:

1. Networked Structure (struktur jaringan)
2. Commitment to a Common Purpose (Komitmen terhadap tujuan)
3. Trust Among The Participants (Kepercayaan)
4. Governance
5. Access to Authority (Akses terhadap kekuasaan)
6. Distributive Accountability/Responsibility (Pembagian Akuntabilitas)
7. Information Sharing (Berbagi Informasi)
8. Access to Resources (Akses terhadap Sumber Daya)

Apabila point-point penting ini di atas tidak bisa dilaksanakan dengan baik maka besar kemungkinan kolaborasi akan gagal.

Ansell dan Gash menjelaskan perbedaan antara jaringan, kolaborasi, dan kemitraan. Jaringan dipakai untuk menggambarkan bentuk kolaborasi pemerintah-masyarakat dengan cakupan yang plural, informal, dan implisit; kolaborasi dipakai untuk menggambarkan kerja sama formal dan eksplisit yang berorientasi pada pengambilan keputusan berdasarkan konsensus; kemitraan dipakai untuk menggambarkan kerjasama yang lebih berorientasi pada koordinasi dibandingkan konsensus (kolektif) dalam pengambilan keputusan (kolektif) (Fitriana, 2017).

5.3.3 Ukuran Kegagalan Kolaborasi Model Ukuran Keberhasilan Kolaborasi

De Seve (dalam Sudarmo, 2011: 110–111) menyebutkan terdapat 8 (delapan) indikasi yang bisa dijadikan standar untuk menilai kegagalan kolaborasi dalam tata kelola, antara lain :

1. Struktur Jaringan / *Network Structure yang buruk*

menjelaskan bagaimana hubungan antar bagian yang mewakili komponen fisik jaringan yang dipertimbangkan dijelaskan secara konseptual. Milward dan Provan (sebagaimana dikutip dalam Sudarmo, 2011) mengklasifikasikan struktur jaringan menjadi tiga bentuk berbeda:

1. *Self Governance* yang tidak berjalan baik
2. *Lead Organization yang buruk*
3. *Network Administrative Organization* yang berjalan baik
4. Tidak ada Komitmen Terhadap Tujuan / *Commitment To A Common Purpose yang*
5. Kurang ada Kepercayaan Antar *Stakeholders / Trust Among The Participants*
6. Tata Kelola / *Governance yang buruk*

Rasa saling percaya di antara para pemangku kepentingan ialah komponen penting dalam tata

kelola. Diantaranya adalah:

- a. Batasan dan eksklusivitas (*Boundary and exclusivity*) jaringan menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh berpartisipasi.
- b. *Rule*/Aturan yang bila disepakati oleh kedua belah pihak, menjelaskan aturan yang tersurat. Selain itu, adanya perjanjian dan sanksi apabila terjadi sesuatu yang bertentangan dengan peraturan yang telah disepakati bersama.
- c. Penentuan nasib sendiri (*Self determination*), yakni wewenang untuk memilih siapa yang boleh dan bagaimana menjalankan persekutuan.
- d. Akses Terhadap Kekuasaan / *Access to Authority*
- e. Pembagian Akuntabilitas/Responsibilitas / *Distributive*
- f. *Accountability/Responsibility*
- g. Berbagi Informasi / *Information Sharing*
- h. Akses Terhadap Sumber daya / *Access to Resources*

Indikasi terakhir menunjukkan ketersediaan atau aksesibilitas material, manusia, teknologi, dan sumber daya lain yang dibutuhkan jaringan untuk meraih tujuannya. Pemerintah harus menyediakan sumber daya keuangan atau sumber daya lainnya, jika memungkinkan. Jika hal ini tidak memungkinkan, pemerintah bisa bekerja sama dengan organisasi swasta atau lembaga keuangan lainnya untuk melakukan investasi.

5.1 Resistensi atas Kebijakan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

Alasan Warga Menolak Tambang Geothermal

Proyek panas bumi Pegunungan Poco Leok akan mencakup 60 lokasi pengeboran yang tersebar di 13 komunitas adat di tiga desa: desa Lungar, Mocok, dan Golo Muntas. Sebagai bagian dari sosialisasi pemerintah daerah, rencana perpanjangan PLTP Ulumbu Unit 5-6 Poco Leok

bertujuan untuk meningkatkan kapasitas listrik dari eksisting 7,5 MW menjadi 40 MW. Terpisah menjadi Sumur E (Desa Cako, Leda, dan Desa Lelak Lungar) dan Sumur D (Lingko Tanggong milik masyarakat Desa Lungar).

Masyarakat yang tinggal di 10 *gendang* di Poco Leok bertekad menentang usulan pembangunan tambang panas bumi PLTP Ulumbu karena sejumlah alasan:

1. Mayoritas dari hal ini berasal dari kekhawatiran akan dampak buruk proyek tersebut. Kekhawatiran masyarakat setempat ialah bahwasannya proyek panas bumi akan mengakibatkan penurunan produksi pertanian, serupa dengan apa yang terjadi di masyarakat lain. Dulu, hasil panen masyarakat sekitar, seperti kopi, cengkeh, coklat, kemiri, dan lain-lain, bisa meraih ton. Namun sejak PLTP Ulumbu mulai beroperasi pada tahun 2012, jumlah hasil pertanian masyarakat sekitar mengalami penurunan.
2. Penambangan dan eksplorasi panas bumi tidak sesuai di Poco Leok karena topografinya. Terutama karena Poco Leok secara topografi berbentuk seperti perbukitan terjal. Selain itu, kondisi medan yang tidak stabil dan kecenderungan turun hujan sepanjang tahun, meningkatkan risiko tanah longsor di lereng.
3. Kegagalan proyek panas bumi Mataloko dan dampak buruk panas bumi Ulumbu menjadi pembelajaran bagi masyarakat Poco Leok. Lokasi lain yang kini mempunyai proyek panas bumi telah mengalami erosi tanah dan penurunan permukaan tanah.

4. Secara antropologis, wilayah yang akan dieksplorasi sangat erat kaitannya dengan bea cukai, dan penolakan ini dilatarbelakangi oleh risiko gangguan kesehatan akibat pengaruh H₂S yang menyebabkan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
5. Bahaya terhadap tatanan kehidupan dan budaya komunal. Penduduk Poco Leok sangat mengapresiasi budaya. Ritual adat mempunyai keterkaitan yang kuat dengan alam, termasuk ladang, hutan, dan mata air. Filsafat budaya Manggarai, khususnya di tanah mbate dise ame, ledong dise empo (ungkapan adat). Artinya, tanah ialah warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang seseorang. Di Poco Leok berlaku ungkapan "gendang satu lingko peang". Gendang melambangkan rumah, surga, dan tempat tinggal. Lingko ialah tempat masyarakat tinggal bersama, bekerja, bercocok tanam, dan mencari kebun bersama.

Perlu dicatat bahwa, menurut interpretasi berbeda mengenai tata kelola kolaboratif, kebutuhan akan kolaborasi sebagian besar berasal dari hubungan saling ketergantungan yang terjalin antara pihak-pihak atau pemangku kepentingan. Sebuah proses yang mencakup interaksi yang saling menguntungkan antara para pelaku tata kelola dan norma-norma bersama bisa dipakai untuk menggambarkan tata kelola kolaboratif. Tujuan yang bermanfaat bagi setiap pemangku kepentingan bisa dicapai dengan memakai sudut pandang tata kelola kolaboratif. (Irawan, 2017).

Temuan penelitian ini memperlihatkan dengan gamblang bahwasannya konsep collaborative governance tidak diterapkan dengan baik. Interaksi saling menguntungkan antara stakeholders (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) tidak berjalan dengan baik sesuai prinsip-prinsip kolaborasi.

Tahapan Model Collaborative Governance yang disarankan oleh Ansell dan Gash tidak berlangsung sesuai urutan kolaborasi.

Komunikasi terhambat pada tahap pertama proses ini karena sifat hubungan yang tidak simetris antara masyarakat dan pemimpin adat, yang mempunyai sejarah dan kepentingan berbeda. Dalam hal kepemimpinan fasilitatif, tiga elemen yang dikemukakan oleh Ryan dalam Ansell dan Gash pengawasan yang memadai terhadap proses kolaborasi, pengawasan terhadap kapasitas untuk menjalankan kredibilitas teknis, dan jaminan bahwasannya kerja sama diberdayakan pada akhirnya menghasilkan keputusan yang menjadi normatif secara sosial.

Persoalan selanjutnya ialah legitimasi prosedur yang terjadi dalam kolaborasi sangat diragukan. Hal ini tampak dalam keraguan masyarakat setempat akan manfaat dari proyek Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi yang dilaksanakan di daerah mereka, dan kerugian yang akan ditimbulkan oleh proyek tersebut. Pemerintah Daerah dalam hal ini dianggap tidak terbuka dan eksklusif dalam memandang keberlangsungan proyek ini bagi kepentingan masyarakat banyak.

Dalam Proses kolaborasi di mana penentuan masalah, penentuan tujuan dan implementasi berjalan tumpang tindih dan dilaksanakan serampangan. Dialog tatap muka dengan masyarakat, membangun kepercayaan masyarakat, komitmen terhadap proses dan share pengertian kepada masyarakat pada akhirnya menimbulkan hasil sementara yang di mana proyek ini bahkan menjadi mandek dan tidak bisa dilanjutkan.

Selanjutnya, pemangku kepentingan dibagi menjadi kelompok kunci/utama (primer) dan anak perusahaan sesuai Clarkson (1995). Pemerintah Daerah ialah pemangku kepentingan utama dalam hal ini, karena keterlibatan mereka mempunyai dampak yang signifikan terhadap hasil proyek. Dalam konteks pengembangan tenaga panas bumi, pemangku kepentingan sekunder ialah

kelompok pemangku kepentingan yang mempunyai pengaruh terhadap organisasi lain dan dipengaruhi oleh mereka. Kelompok-kelompok ini mencakup kelompok masyarakat dan tetua adat, yang tidak terlalu terlibat dalam proses pengembangan proyek dan dianggap tidak penting bagi keberlanjutan proyek.

Menurut Clarkson, (Crosby, 1991) juga mengklasifikasikan pihak-pihak berdasarkan atributnya, khususnya: 1) pemangku kepentingan utama, atau mereka yang mendapat manfaat langsung dari sebuah proyek atau program dan mempunyai kepentingan dalam operasionalnya, seperti masyarakat lokal yang tinggal di dekat proyek atau program tersebut. pengembangan proyek; 2) pihak yang menyajikan dukungan (pemangku kepentingan sekunder), seperti tokoh agama dan adat, namun tidak tertarik dengan kegiatan namun tetap peduli; 3) pihak-pihak penting, khususnya pihak yang mempunyai kapasitas hukum mengambil keputusan, seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai.

Ackermann dan Eden membagi pemangku kepentingan ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kekuasaan dan kepentingan. Tujuan dari pemetaan ini ialah untuk mengelompokkan para pemangku kepentingan berdasarkan bagaimana hubungan kekuasaan dan kepentingan mereka satu sama lain (Ackermann & Eden, 2011).